

# Studi Kasus Kesalahan Penulisan Nama Kapal MT. Gloria Sentosa di Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Septina Dwi Retnandari<sup>1)</sup>, Khaeroman<sup>2)</sup>, Muhammad Edi Azmi<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Politeknik Maritim Negeri Indonesia

Jl. Pawiyatan Luhur I-1, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50235

Email: <sup>1)</sup>septina@polimarin.ac.id, <sup>2)</sup>khoer@polimarin.ac.id, <sup>3)</sup>edyazmi97@gmail.com

## Abstrak

Pada proses sandar kapal dokumen kapal sangat penting terutama Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena sangat berdampak besar untuk kelancaran sandar kapal dan dapat berpengaruh terhadap proses bongkar muat barang. Selain itu penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan kapal ditahan dan dampak yang ditimbulkan dari penahanan kapal terhadap proses bongkar muat kapal di dermaga. Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan jenis sumber data primer dan sekunder. Analisa data menggunakan teknik kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kesalahan penulisan nama kapal pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kelancaran sandar kapal di pelabuhan tujuan yang diageni oleh PT. Bintang Samudra Utama. Faktor yang menyebabkan kapal MT. Gloria Sentosa ditahan oleh pihak Syahbandar yaitu adanya kesalahan penulisan nama kapal pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kemudian berdampak pada proses bongkar muat kapal di dermaga. Adapun upaya yang dilakukan yaitu petugas Syahbandar dan Nahkoda lebih teliti dalam pengecekan dokumen dan perusahaan harus lebih selektif dalam memilih kapal yang akan diageni.

**Kata Kunci:** Kapal sandar, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Syahbandar

## Abstract

In the ship berthing process, ship documents are very important, especially the Sailing Approval Letter because it has a big impact on the smooth berthing of the ship and can affect the process of loading and unloading goods. Apart from that, this research discusses the factors that cause ships to be detained and the impact that ship detention has on the process of loading and unloading ships at the dock. This research is a descriptive type of research with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation with primary and secondary data sources. Data analysis uses qualitative techniques. The purpose of this research is to determine the impact of errors in writing the name of the ship on the Sailing Approval Letter on the smooth berthing of the ship at the destination port agented by PT. Bintang Samudra Utama. Factors that cause MT vessels. Gloria Sentosa was detained by the harbormaster because there was an error in writing the name of the ship on the Sailing Approval Letter and this had an impact on the loading and unloading process of the ship at the dock. The efforts made are that the Harbor Master and Master officers are more thorough in checking documents and the company must be more selective in choosing the ships that will be agented.

**Key words:** *Ship berthing, Sailing Approval Letter, Syahbandar.*

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pra Survei di PT. Bintang Samudra Utama di bagian Keagenan terutama bagian operasional, bagian tersebut memiliki tugas mengurus kapal sandar di pelabuhan sampai kapal berangkat ke pelabuhan tujuan. Untuk pengurusan dokumen kapal di pelabuhan umum Gresik sendiri berbasis *online* menggunakan sistem *inaportnet* di mana pihak agen akan membuat warta kapal yang digunakan untuk pemberitahuan kedatangan kapal dan pendaftaran kapal. Setelah itu dilakukan meeting untuk menentukan tanggal kapal akan sandar dan menentukan lokasi dermaga yang akan digunakan untuk sandar dan kegiatan bongkar muat. Jika kapal sudah sampai dan berlabuh di kawasan pelabuhan Gresik maka pihak agen akan menghampiri kapal ke tengah laut untuk mengambil dokumen kapal yang diperlukan untuk mengurus ijin sandar, bongkar muat, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pihak agen akan mengecek dokumen apakah sudah lengkap dan memastikan masa berlaku dokumen, karena sistem *inaportnet* berbasis *online* ini jika tidak sesuai otomatis tidak akan bisa masuk proses input dan kapal tidak akan bisa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan selanjutnya. walapun sudah berbasis *online* pihak agen juga harus menyerahkan dokumen asli kapal dan akan ditahan sampai kegiatan bongkar muat selesai. Dengan sistem *inaportnet* ini, kesalahan sedikitpun akan terdeteksi dan akan dipertanyakan oleh petugas Syahbandar dan data yang diinput akan ditolak oleh petugas Syahbandar sampai ada kejelasan dan diperbaiki. Sistem *inaportnet* sangat membantu untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran dalam pengurusan dokumen untuk agen agar lebih teliti dalam mengecek dokumen dan memahami fungsi setiap dokumen kapal.

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami kasus terjadinya kesalahan penulisan nama kapal pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dilakukan di kapal MT. Gloria Sentosa secara deskriptif, mengetahui penyebab dan dampak dari kesalahan yang terjadi. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajibannya (Clearance et al., 2014). Berdasarkan UU No. 17 tahun 2008 (RI, 2008) tentang pelayaran, Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu serangkaian tahap kegiatan pemenuhan persyaratan berlayar dari mulai pengecekan aspek dokumentasi, administratif, teknis dan radio kapal sampai tahap dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar atau kelegalitasan berlayar dari instansi pelabuhan setempat. Pengawasan terhadap Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (Ignatius Martan et al., 2023) menjadi faktor penting dalam keamanan barang yang dimuat dan kelancaran pengiriman barang. Syahbandar memiliki otoritas untuk memeriksa kapal, awak kapal, dan muatannya apakah telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan kemampuan berlayar. Demikian juga pengawasan terhadap kepatuhan semua pihak dalam pelaksanaan tata cara penerbitan izin berlayar akan berujung pada tercapainya keselamatan dan keamanan dalam pelayaran (Abbas et al., 2021). Transportasi laut memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dunia dimana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam bisnis transportasi laut. Angkutan transportasi laut merupakan moda transportasi yang penuh regulasi (aturan) sejak kapal dipesan, dibuat/ dibangun hingga kapal beroperasi. Regulasi termasuk harus dipatuhi dan dalam proses pelaksanaannya selalu dilakukan pengawasan supaya efektivitas operasional pelayaran bisa tercapai sekaligus juga agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan pelayaran yang berlaku. Keselamatan dan keamanan dalam industri perkapalan menjadi penting karena memberi dampak pada percepatan pengiriman barang dan pada peningkatan gerak bisnis. Berdasar pada pencapaian kondisi ini, maka meneliti kasus urusan SPB sebagai salah satu penghalang lancarnya jasa transportasi kapal menjadi amat penting untuk dilakukan (Soemarmi & Diamantina, 2019).

Beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan Surat Persetujuan Berlayar lebih berfokus pada penelitian deskriptif yang fokus pada Syahbandar sebagai pejabat pemerintah yang berkepentingan dan bertanggungjawab pada keamanan dan keselamatan berlayar (Aguw, 2013), (Abbas et al., 2021). Lebih spesifik (Sonhaji, 2018) menghasilkan kesimpulan tentang adanya pengaruh Pemberian Surat Persetujuan Berlayar terhadap aspek pemenuhan keselamatan berlayar. Jasa transportasi laut akan semakin diminati jika kepuasan bersama antara pemilik kapal, agen kapal dan konsumen penerima jasa pelayaran transportasi laut bisa tercapai. *Shipping* telah dan akan memperoleh kepercayaan. Ketika master secara absolut melakukan kontrol atas kegiatan *shipping*. Penelitian yang dilakukan oleh Mitroussi (Mitroussi, 2013) merefleksi sejumlah perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, terkait dengan suatu pandangan yang memberikan diskusi kritis mengenai implikasi dari manajemen kapal. *Shipping* sebagai industri global beroperasi di bawah peraturan, di dalamnya tentu termasuk peraturan nasional. Manajemen kapal tidak luput dari elemen manusia. Perubahan manajemen kapal yang mungkin butuh untuk direspon dan disesuaikan di dalamnya termasuk peraturan dan urusan teknis. Pada (Priyohadi et al., 2020) dalam penelitiannya yang dilakukan di PT. Dian Samudera Line – Surabaya menemukan bahwa variabel yang memberi pengaruh dominan pada lamanya pelayaran kinerja agen pelayaran adalah variabel Pelayanan Kapal Pandu, variabel Produktivitas Bongkar Muat di Dermaga, dan variabel Waktu Kepengurusan dokumen serta mencari variabel yang paling dominan yang berpengaruh terhadap Kinerja Agen Pelayaran. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dipakai oleh peneliti sebagai pembanding adalah pada penekanan kasus SPB. Bagaimana SPB diperiksa, diamati, dan akhirnya ditemukan sebagai dokumen yang salah karena tidak sesuai dengan fakta identitas yang ada. Hal ini menjadi penting karena faktor manusia sebagai pelaksana pengurusan SPB yang

bertanggungjawab pada kebenaran pengisian atau penyusunan SPB sebuah kapal. Oleh karenanya dalam penelitian ini juga dikaji penyebab kasus yang ditelusur dari sisi SDM dan dikaji dampak negatif kerugian finansial yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.

## 2. METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek penelitian adalah kinerja Keagenan PT. Bintang Samudra Utama. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik observasi melalui pengamatan langsung pada masalah di lokasi penelitian, melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dan melakukan dokumentasi atas masalah yang ada pada PT Bintang Samudra Utama yang dipublikasikan secara umum.

Pengolahan data yang dilakukan adalah melakukan reduksi data di mana reduksi data merupakan tahapan pengolahan data yang dilakukan dengan cara merangkum, dan memilih hal-hal yang penting untuk kemudian disatukan. Penelitian ini melalui tahap pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dan merangkum berbagai data sesuai dengan topik pembahasannya. Setelah mereduksi data, dilakukan penyajian data, yaitu dengan cara menguraikan secara lengkap.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data yang disajikan dan digambarkan dengan jelas dalam bentuk kalimat, sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dimengerti dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Keagenan terutama bagian operasional memiliki tugas mengurus kapal sandar di pelabuhan sampai kapal berangkat ke pelabuhan tujuan. Pengurusan dokumen kapal di pelabuhan umum Gresik dilakukan berbasis *online* menggunakan sistem *inaportnet*. Dalam sistem ini pihak agen akan membuat warta kapal yang digunakan untuk pemberitahuan kedatangan kapal dan pendaftaran kapal. Setelah itu dilakukan *meeting* untuk menentukan tanggal kapal akan sandar dan menentukan lokasi dermaga yang akan digunakan untuk sandar dan kegiatan bongkar muat. Jika kapal sudah sampai dan berlabuh di kawasan pelabuhan Gresik maka pihak agen akan menghampiri kapal ke tengah laut untuk mengambil dokumen kapal yang diperlukan untuk mengurus ijin sandar, bongkar muat, dan Surat Ijin Berlayar (SPB). Pihak agen akan mengecek dokumen apakah sudah lengkap dan memastikan masa berlaku dokumen, karena sistem *inaportnet* berbasis *online* ini jika tidak sesuai otomatis tidak akan bisa dilakukan *input* data dan kapal tidak akan bisa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan selanjutnya. Walaupun sudah berbasis *online* pihak agen tetap harus menyerahkan dokumen asli kapal dan proses akan ditahan sampai kegiatan bongkar muat selesai.

Melalui sistem *inaportnet*, kesalahan sedikitpun akan terdeteksi dan akan dipertanyakan oleh petugas Syahbandar dan data yang diinput akan ditolak oleh petugas Syahbandar sampai ada kejelasan dan ada perbaikan. Sistem *inaportnet* sangat membantu untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran dalam pengurusan dokumen untuk agen agar lebih teliti dalam mengecek dokumen dan memahami fungsi setiap dokumen kapal.

Dokumen kapal, terutama Surat Persetujuan Berlayar menjadi faktor utama dalam kegiatan berlayar agar kegiatan lepas sandar kapal dapat berjalan dengan lancar dan aman, termasuk dalam kegiatan bongkar muat barang. Temuan masalah pada penelitian ini disajikan dalam gambar 1 yaitu gambar tentang Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang salah dalam pengetikan nama kapal.

Pada saat kapal yang diageni oleh PT. Bintang Samudra Utama MT. Gloria Sentosa sandar di pelabuhan umum Gresik diperiksa oleh pihak Syahbandar, atau pada saat mengurus *clearance* kapal MT. Gloria Sentosa ditemukan masalah pada nama kapal di Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Pemeriksaan dilakukan karena adanya tindak pidana pelayaran yang diduga dilakukan oleh nakhoda kapal yaitu kesalahan penulisan nama kapal pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kesalahan yang dibuat adalah pada penulisan nama kapal pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sebenarnya nama yang harus ditulis adalah MT. Gloria Sentosa dan petugas menulis dengan nama yang salah yaitu MT. Gloria. Data pada SPB tidak sesuai dengan dokumen. Pihak Syahbandar langsung melakukan penyelidikan dan membuat Berita Acara guna mengatasi masalah tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa penyebab kesalahan penulisan nama kapal pada SPB merupakan kesalahan dari petugas Syahbandar di pelabuhan asal pengurusan SPB. Petugas Syahbandar tidak teliti dalam pengecekan dan penulisan dokumen kapal sehingga terjadi kasus kesalahan penulisan tersebut. Selain itu kurangnya ketelitian nakhoda kapal terhadap pengecekan dokumen kapal. Nakhoda kapal turut bertanggung jawab dalam pengecekan dokumen. Hal ini artinya penerbitan SPB tidak sesuai dengan mekanisme yang diharapkan undang-undang karena kurangnya pegawai dan juga rendahnya pemahaman pegawai tentang tugas dan fungsinya sehingga tetap terjaga kualitas, kemampuan dan keahliannya perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan (Silambi et al., 2022).

Dampak yang diperoleh adalah terjadi penahanan kapal MT. Gloria Sentosa. Saat terjadi penahanan kapal langsung dibuatkan Berita Acara oleh pihak Syahbandar yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terkait. Selama proses penyelidikan, kapal ditahan dan tidak boleh keluar area pelabuhan serta tidak boleh melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.



Gambar 1. SPB dengan Kesalahan Nama Kapal

Proses bongkar muat barang harus segera dilaksanakan mengingat barang yang diangkut oleh kapal MT. Gloria Sentosa merupakan barang berbahaya dan berbentuk cair yaitu sulfur. Barang yang terlalu lama di atas kapal akan menyebabkan kerugian karena bertambahnya biaya operasional untuk menjaga barang tetap dalam kondisi aman. Mengingat sifat sulfur yang mudah mengeras di suhu dingin maka kondisi penahanan kapal akan berakibat pada bertambahnya ongkos perawatan barang karena barang harus tetap dijaga suhunya, sedangkan untuk membuat stabil suhu butuh banyak solar untuk bahan bakar.

#### 4. KESIMPULAN

Masalah yang ditemukan pada proses penangkapan kapal MT. Gloria Sentosa yaitu kesalahan penulisan nama kapal pada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dilakukan oleh petugas Syahbandar pelabuhan asal dan Nahkoda yang kurang teliti dalam pengecekan dokumen kapal. Karena penemuan tersebut, setelah sampai di pelabuhan tujuan MT. Gloria Sentosa diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pelayaran dan kapal ditahan oleh pihak Syahbandar. Selama penahanan kapal tidak boleh melakukan kegiatan apapun dan dipaksa keluar dermaga dan berlabuh di area pelabuhan Gresik. Menurut (Priyohadi et al., 2020) menyimpulkan bahwa faktor dominan yang memberi pengaruh pada layanan jasa kapal adalah waktu pengurusan dokumen. Penyebab kasus kesalahan penulisan nama kapal pada SPB merupakan kesalahan dari petugas Syahbandar di pelabuhan asal dan kurangnya ketelitian nahkoda kapal. Implementasi kebijakan surat persetujuan berlayar masih kurang berjalan dengan baik (Mandala et al., 2016).

Dampak dari penahanan kapal MT. Gloria Sentosa yang diageni PT. Bintang Samudra Utama Gresik, yaitu keterlambatan proses bongkar muat karena kapal tidak boleh melakukan aktivitas apapun dan tidak boleh keluar area pelabuhan Gresik serta dipaksa keluar dari dermaga dan berlabuh di area pelabuhan guna menghindari masalah lalulintas kapal karena masih banyak kapal yang akan sandar di dermaga. Selain itu pihak pemilik barang harus membayar ongkos lebih untuk perawatan barang dan banyak waktu terbuang untuk agen karena mengurus kapal dan mengusahakan menyelesaikan masalah kapal secepatnya.

PT. Bintang Samudra Utama Gresik harus meningkatkan selektifitas dalam menerima kapal yang akan diageni dan menjalin komunikasi yang baik antara *owner* kapal dengan pihak perusahaan agar tidak terjadi *miscommunication* dan

jika terjadi masalah bisa diselesaikan dengan seksama dan dapat memperlancar proses penanganan kapal. Perusahaan juga sebaiknya lebih meningkatkan kinerja karyawan terutama staf operasional untuk meningkatkan hubungan komunikasi yang baik dengan nakhoda kapal dan pihak Syahbandar agar jika terjadi suatu masalah bisa saling membantu memecahkan masalah dengan cepat. Kesimpulan yang sama diperoleh (Aguw, 2013) yaitu bahwa Syahbandar perlu memberi perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukannya dengan tujuan agar pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran mampu meningkat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Jurusan Bisnis Maritim, Program Studi Transportasi Laut dan kepada Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) yang banyak mendukung dalam kelancaran pelaksanaan penelitian dan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., Nawi, S., Baharuddin, H., & Abas, I. (2021). A Legal Review of Sailing Approval Letter: Systems and Procedures. *Jambura Law Review*, 3(1), 124–138. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.9881>
- Aguw, R. y. . (2013). Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari Uu Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Lex Administratum*, 1(1), 45–56.
- Clearance, P., Clearance, P., & Clearance, P. (2014). (*port clearance*).
- Ignatius Martan, Pius Memo Gading Agum Gumelar, & Andar Sri Sumantri. (2023). Analysis of Ship Seaworthiness Factors, Health and Safety Culture, Oversight of Port Authority and Harbor Authority Offices on Shipping Safety. *Terbuka Journal of Economics and Business*, 4(1), 44–57. <https://doi.org/10.33830/tjeb.v4i1.4898>
- Mandala, E., Setyadiharja, R., Jefri, J., Renaldi, R., & Mulyani, N. (2016). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 249. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.603>
- Mitroussi, K. (2013). Ship management: Contemporary developments and implications. *Asian Journal of Shipping and Logistics*, 29(2), 229–248. <https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2013.08.006>
- Priyohadi, N. D., Ardiansyah, R. A., & Soedarmanto. (2020). Analisis Faktor-faktor Penghambat Kedatangan Kapal Pelayaran Domestik Terhadap Kinerja Perusahaan Keagenan pada PT. Dian Samudera Line - Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(1), 147–155.
- RI, P. (2008). UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. *The Visual Computer*, 24(3), 155–172.
- Silambi, E. D., Badilla, N. W. Y., & Ismai, N. (2022). Implementation of Supervision Policies on Service Procedures for Issuance of Sailing Approval. *SHS Web of Conferences*, 149, 03014. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214903014>
- Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>
- Sonhaji, S. (2018). Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 299–305. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.299-305>